

KLIENTALISME *BROKER* ANTARA ELIT BALADIKA BALI DAN ELIT PDIP DALAM PILGUB 2018

I Gusti Ngurah Rai Dwipayana.¹⁾, Muhammad Ali Azhar²⁾, A.A.Sagung Mirah Mahaswari J.M³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: igst.ngr.raidwipayana@gmail.com, aliazhar23mr@yahoo.co.id², mahaswari@unud.ac.id³

ABSTRACT

After the end of the new order regime, the existence of community groups made it a necessity in a democratic country. The presence of community group the local electoral in Bali in particular is able to provide its own color. Bali governor election 2018 became a separate stage for the contestation between Baladika Bali and PDIP to consolidate their power. With the Patron-Client Theory approach, this research presents as a description of how the actions carried out by CSOs with a background of violence in fighting over the land of power, and of course the status of power. Dynamic politics makes this phenomenon polarized in diverse manifestations. There is a cultural connection, but there also involves a broker in it. Research using ethnographic qualitative methods or field research. The results of this study explain that the clientelism relationship that occurs is a remuneration for assistance given by Patron to Clients.

Keywords :Broker, Baladika, PDIP, Bali Governor Election 2018.

1. PENDAHULUAN

Salah satu ciri yang menonjol di Indonesia pasca keruntuhan rezim Soeharto adalah maraknya kelompok-kelompok kekerasan berbasis identitas di tengah masyarakat (Masaaki, 2006: ix). Fenomena ormas menjadi sebuah keniscayaan di negara demokrasi. Hal ini karena ormas menjadi salah satu organisasi kekuatan nonformal negara. Pada kapasitas tersebut ormas bisa menjelma menjadi beragam bentuk, baik dia sebagai pendukung berjalannya demokrasi, atau sebagai parasit demokrasi. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah kehadiran ormas di Bali.

Sebuah harian surat kabar lokal Bali memuat berita tentang deklarasi dukungan oleh organisasi masyarakat Baladika Bali kepada calon kepala daerah

pada Pilkada 2018 (Bali Post, 2018). Menjelang pemilihan kepala daerah, organisasi masyarakat kerap menjadi rebutan untuk mendapatkan jumlah suara bagi aktor-aktor politik yang berkepentingan saat pemilu, salah satunya dari PDIP. Kehadiran ormas sebagai sebuah infrastruktur politik merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi.

Akan tetapi, ormas Baladika yang kita ketahui sangat berbanding terbalik dengan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Ormas yang seharusnya tidak berpolitik, atau tidak terlibat dalam kegiatan/agenda politik, justru secara terang-terangan ikut menjadi politik partisan dan memberikan dukungan kepada elit tertentu. Seiring berjalannya waktu, lambat laun keberadaan ormas mulai berubah

fungsi dan menjelma menjadi makelar suara dukungan politik.

Gambaran tersebut memicu munculnya pertanyaan tentang adanya sebuah relasi kepentingan politik yang berlangsung, khususnya praktek klijentalisme politik yang terjadi dengan elit partai politik. Klijentalisme mengandung tiga hal, *Pertama*, kontingensi atau timbal balik “pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung dari pemberian keuntungan dari pihak lain. Biasanya, sumber-sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. *Kedua*, bersifat hirarkis, relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dan klien. *Ketiga*, bersifat terus-menerus.

Seperti yang terjadi dalam Pilkada Bali 2018 yang telah selesai dihelat beberapa waktu lalu. Memunculkan pasangan gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, I Wayan Koster dan Cok Oka Artha Ardhana Sukawati atau *KBS-Ace* sebagai pemenangnya. Pasangan tersebut unggul dengan perolehan 1.213.075 atas rivalnya Rai Mantra dan Ketut Sudikerta dengan 889.930 suara (Daryono, kumparan.com, 2018). Kemenangan tersebut tidak lepas dari dukungan suara yang diberikan Ormas Baladika Bali. Hal tersebut tidak lepas dari keterlibatan tokoh/oknum yang menjadi *broker* antara keduanya, sehingga mampu menjalin kerjasama dengan elit yang berada dalam ranah kekuasaan.

Pada umumnya kemunculan ormas di Indonesia selalu mewarnai kehidupan politik, terlebih di tingkat lokal seperti di Bali. Organisasi-organisasi ini selalu terstruktur secara hirarkis dan diatur secara geografis, dengan tim yang terbaik yang terorganisir merentang dari sekelompok koordinator di posisi puncak yang membantu calon sampai ke para *broker* yang bekerja di tingkat masyarakat paling bawah (Aspinall, 2019 :137).

Bahkan, dalam setiap momen perebutan kekuasaan di negeri ini sudah lumrah terjadi pengerahan kelompok/organisasi kekuatan massa untuk kepentingan politik saat pesta demokrasi pemilu, kampanye (Suryawan, 2006 : 100). Hubungan keduanya yang paling jelas dapat kita lihat adalah antara Baladika dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Memasuki masa-masa perhelatan politik, sebagian dari mereka berkamufase bersama partai politik untuk sekedar mencari tempat agar mendapatkan uang, tentunya dengan memberikan dukungan suara. Hingga saat ini, masih belum banyak penelitian yang berani membuka apa sebenarnya yang ada di balik fenomena patonase yang terjadi. Khususnya yang melibatkan elit partai yang sekaligus sebagai *broker* dengan organisasi masyarakat dalam lingkaran demokrasi menjadi perantaranya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan sebuah teori sebagai alat untuk menganalisa fenomena yang terjadi. Supaya dapat menganalisa serta menjelaskan pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, memerlukan pendekatan secara teoritis yang harus dilakukan. Penelitian ini menggunakan analisa teori *Patron-Klien*.

Dalam sudut pandang teori patron klien menjelaskan bahwa dalam suatu interaksi sosial masing-masing aktor mempunyai hubungan timbal balik. Hubungan yang klientalistik terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama, dalam hal ini antara "*patron*" dan "*klien*". Masing-masing pihak mempunyai sejumlah "*resources*" atau sumber daya yang dipertukarkan "*exchange*" satu sama lain yang saling menguntungkan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif etnografi, yang dimana pada penelitian ini bertujuan untuk dapat memaparkan serta menganalisa suatu fenomena sosial politik. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *snowball*.

Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan. Sehingga kita harus mencari orang / narasumber yang lain lagi, yang dapat digunakan sebagai sumber data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdirinya Baladika Bali

Dimulai dengan kasus keributan di Simpang Siur, setelah itu terjadi keributan antara FPD dengan Laskar Bali, dan munculnya Baladika Bali diawali peristiwa keributan di tempat hiburan malam Denpasar Moon (DM). Peristiwa keributan/perkelahian yang terjadi di Denpasar Moon (DM) karaoke di Jalan Sudirman Denpasar pada hari Minggu, 30 November 2003 pukul 05.00 WITA, mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang luka parah. Korban yang tewas adalah Koptu I Gusti Ketut Suardika, anggota Provost Korem 163 Wirasatya. Sementara dua rekannya yang menderita luka serius adalah Koptu Ketut Celagi, dan Koptu Made Taman Budi.

Kejadiannya berawal dari kedatangan salah seorang anggota Laskar Bali yang bernama I Nyoman Wiryawan, yang juga adalah manager Langit Biru Karaoke, tempat yang biasanya menjadi tempat berkumpul dan sponsor utama anggota Laskar Bali (Suryawan, 2005: 303-307). Di dalam tempat karaoke tersebut, Wiryawan adu mulut dan bentrok fisik saling pukul dengan salah seorang pengunjung DM, anggota preman di Sudirman, anak tentara yang menguasai daerah tersebut.

Keributan pun akhirnya terjadi antara preman Sudirman yang tergabung ke dalam FKPP (Forum Komunikasi Pensiunan Purnawirawan Indonesia) dengan anggota dari Laskar Bali tersebut. Pada saat yang bersamaan tiga anggota Provost yang menjadi korban perang anggota ormas ini datang untuk meleraikan

keributan. Markas mereka tepat di seberang jalan DM. Di sinilah, Koptu I Ketut Celagi sempat menarik baju Wiryawan dan memintanya untuk meninggalkan DM.

Koptu I Gusti Ketut Suardika meninggal di tempat kejadian karena ditebas senjata tajam dan hujaman tombak hingga tumbang di pinggir got depan DM. Sedangkan dua rekan Suardika, Koptu I Ketut Celagi cedera berat di bagian lengan kiri karena sabetan celurit dan Koptu Made Taman Budi cedera berat di kening kiri dan pergelangan tangan kanannya nyaris putus.

Sedangkan nasib naas dialami oleh *security* DM. Oktavianus Kocu yang pada saat kejadian tidak sempat melarikan diri dan ikut terluka karena berada di tempat kejadian. Dia (Oktavianus Kocu) sempat mau melarikan diri, akan tetapi dua pintu keluar DM sudah dijaga oleh anggota Laskar Bali. Akhirnya dia tumbang dengan luka sabetan serta luka tusukan pedang dan senjata tajam lainnya.

Selain itu, sedikitnya 15 orang karyawan DM dan pengunjung juga ikut menjadi korban dan mengalami luka ringan. Setelah kejadian tersebut, akhirnya ditetapkan sembilan orang tersangka kejadian di DM.

Kemudian dari sinilah diusulkan untuk membuat sebuah organisasi yang dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Organisasi yang bisa mendidik untuk menjadi orang yang baik, bukan sebaliknya. Tanggal 5 Mei 2004 berdirilah Ormas Baladika Bali dan

dideklarasikan di Denpasar pada tanggal 24 Juli 2005.

Dari sana dibuatkanlah pakem bahwa Pak Sudiantara mau ikut bergabung dan menjadi Ketua Dewan Pembina Baladika Bali dengan catatan Baladika Bali kedepannya harus menghormati hukum. Baladika Bali didirikan sebagai penyeimbang Laskar Bali.

Baladika Bali adalah organisasi yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia. Dokumen-dokumen Baladika Bali di Badan KESBANGPOLINMAS sudah lengkap dan secara resmi terdaftar dengan nomor inventarisasi : 220/208/KBPM/ORG dan berasaskan Pancasila. Tujuan dibentuknya Baladika Bali yang pertama adalah mewujudkan dan memperkokoh jiwa persaudaraan (menyame braya) di dalam maupun di luar lingkungan organisasi dan ikut berperan serta untuk merealisasikan *ajeg* Bali.

Kiprah Baladika Dalam Pemilu 2019 di Bali

Sesuai dengan yang tertulis didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Baladika Bali, memang bahwa organisasi baladika itu merupakan organisasi kemasyarakatan yang bebasa aktif, artinya tidak berpolitik sebenarnya. Karena kita menghimpun segala elemen keanggotaannya, ada kader Golkar, ada kader Gerindra, ada kader PKPI dulu, pokoknya banyak elemen partai didalamnya, pada bagian tubuh Baladika itu.

Sehingga kita menyebutkan di dalam Anggaran Dasar bahwa Baladika tidak berpolitik secara organisasi. Tetapi karena undang-undang mengisyaratkan bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak politik, dia boleh menentukan vote atau pilihannya di saat ada kontestasi politik, entah itu pilgub, pilpres, pileg, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya berulang kali para spesialis kekerasan non-pemerintah secara efektif bersekutu dengan pemerintah, menjadi bagian dari pemerintahan, mengambil alih pemerintahan yang ada, atau menjadi pemerintahannya sendiri (Tilly dalam Wilson 2018 : 1). Kalau kita berbicara ormas, dari dulu dari jaman Indonesia merdeka, semenjak Indonesia mulai berdiri sebagai sebuah negara kesatuan para elit sudah berfikir bahwa ormas itu adalah alat yang akan dipergunakan untuk melanggengkan sebuah sistem kepemimpinan atau apapun namanya itu. Yang sifatnya non struktural lembaga negara.

Hal tersebut merupakan sebuah argumentasi bahwa semakin menjamurnya ormanisasi masyarakat di Bali kini, juga dibarengi dengan bagaimana hubungan mereka dengan pihak-pihak berkuasa seperti aparat pemerintah, kepolisian, tentara, dan sudah barang tentu konglomerat (Suryawan, 2005). Kontestasi perebutan kekuasaan seperti pemilu 2004, Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2005, Pilkada Bali Tahun 2011, hingga sampai pada Pilkada Bali 2018. Mereka

menjadi kontestan tidak resmi atau ikut berafiliasi dengan sejumlah partai politik.

Dalam pemilu saat ini sepak terjang mereka mengalami pergeseran yang sangat jelas terlihat. Yang semula hanya menjadi pendukung dari belakang panggung demokrasi, kini menjadi aktor di atas panggung demokrasi. Salah satu kontestasi kekuasaan yang melibatkan banyak peserta khususnya dari kalangan ormas yang memperebutkan materi, lahan kekuasaan, dan yang terpenting adalah status untuk berkuasa.

Fakta tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh (Masaaki Okamoto dan Abdur Rozaki 2006, xi) bahwa kekerasan non-negara di Indonesia terus terjadi bukan karena negara dengan sengaja melakukan pembiaran, akan tetapi kenyataan bahwa elit-elit politik dan ekonomi mengandalkan kekerasan itu untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan kepentingan mereka sendiri.

Klientalisme Baladika dengan Puri (Institusi)

Pada penyelenggaraan kontestasi Pilkada Bali 2018, yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan.

Namun secara tidak langsung, perhelatan pilgub Bali 2018 tersebut memperlihatkan pertarungan puri dalam merebut kekuasaan. Puri memiliki

pengaruh kekuatan yang penting untuk menarik massa, yakni dengan daerah pengaruh dan taklukannya / daerah kekuasaannya. Maka puri tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik dan kekuasaan.

Dalam hal ini puri juga bisa berperan sebagai sebuah negara secara tradisional. Puri telah menjadi "institusi politik" tradisional yang menjadi penghubung berbagai kelompok dan golongan untuk menggali kekuatan dan kekuasaan. Semenjak jaman kolonialisme para penjajah sangat dipengaruhi oleh pandangan Aristokratik dan pandangan hindu tentang masyarakat bali. Ini sangat tercerminkan dalam penyusunan wilayah administratif yang dipengaruhi oleh bias kasta yang sangat ketal.

Secara historis Puri Satria mempunyai perjalanan yang sangat panjang dalam konstelasi politik di bali. Puri Satria sesungguhnya adalah cikal bakal pendiri PNI di bali. Kemudian ketika jamannya Soeharto berkuasa, PNI dilebur menjadi PDI dan partai-partai yang beraliran nasionalis dilebur ke PDI, dan PDI bermarkas pada saat itu di Puri Satria. Namun hal tersebut menjadi berbeda jika kedekatan puri juga terjalin dengan ormas yang ada di daerah.

Salah satunya yang dapat kita lihat adalah kedekatan Baladika dan elit politik Puri Satria. Jika dilihat secara seksama kedekatan Baladika dengan Puri Satria merupakan jembatan awal dari kedekatan Baladika dengan PDIP di bali.

Salah satu faktornya adalah karena anggota ormas itu sendiri adalah bagian dari keluarga puri atau para inisiatornya adalah mereka-mereka yang masih mempunyai kedekatan atau hubungan garis keturunan dengan puri. Salah satunya kedekatan antara A.A. Puspayoga dengan Pak Sudiantara. Secara personal keduanya sama-sama berada pada lingkaran PDIP, namun yang paling menonjol sebagai elit politik adalah A.A. Puspayoga. Dalam struktur pemerintahan di Kota Denpasar, keduanya juga mempunyai pengaruh masing-masing. A.A. Puspayoga ini pernah menjabat sebagai walikota dan Pak Sudiantara ini sebagai Ketua PD Parkir Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam elektoral lokal bali, Pak Sudiantara adalah tangan kanannya dari A.A. Puspayoga termasuk untuk urusan strategi kampanye dan dana. Pada Pilgub Bali 2013 saat Puspayoga mencalonkan diri menjadi gubernur berpasangan dengan Dewa Sukrawan, antara Baladika dan Puri Satria saling berkolaborasi memenangkan pemilu.

Penulis akui bahwa hubungan keduanya memang sudah terbangun sejak lama/mempunyai perjalanan panjang dalam elektoral lokal, selain itu membangun jalinan patronase dalam hal ini juga terdapat nilai secara historis. Pada waktu pemilihan Walikota Denpasar tahun 2005, Baladika yang baru 1 tahun dibentuk pertama kali memberikan dukungan ke Puspayoga (PDIP) melawan A.A. Ngr. Gede Widiade (Golkar). Akan tetapi

Baladika tidak mendukung dengan sifat vulgar.

Sebenarnya dalam tahapan ini yang berperan aktif sebagai Patron adalah Puspayoga dan yang berperan sebagai Klien adalah Pak Sudiantara. Penulis melihat belum terindikasi adanya peran *broker* atau penghubung pada tahap ini. Karena mereka berdua sebagai patron dan klien sangat dekat secara personal.

Klientalisme Baladika dengan *Broker* (Penghubung)

Salah satu hal yang menarik perhatian penulis dalam pelaksanaan Pilgub Bali 2018 adalah ketika faktor “figure/ketokohan” elit politik tidak terlalu memegang peranan untuk memenangkan seorang dalam pemilu. Penulis tidak bermaksud mengesampingkan figur, mengingat hasil pilgub bali kemarin yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Bali) merupakan partai Patron-Klien yang mempunyai elit dan pendukung yang berbeda-beda.

Jika mengacu ke pusatnya ada patron besar yaitu Megawati dan ada sosok Bung Karno. Namun ketika kita melihat ke tingkat daerah, terdapat orang kuat (*bossism*) masing-masing. Setiap daerah PDIP mempunyai yang namanya orang kuat, dan bali mempunyai Puri Satria. Jika soal Patron-Klien, bisa kita katakan bahwa patron itu adalah orang yang mempunyai keturunan darah biru atau Puri Satria. Dari sinilah timbul persaingan di internal partai

PDIP antara pekerja partai dengan elit partai.

Persaingan antara elit-elit PDIP yang pada awalnya sempat terjadi di dalam internal partai, tumpah ruah ke dalam pelaksanaan Pilgub Bali 2018. Namun yang menarik dan menyebabkan rivalitas ini semakin berwarna adalah keikutsertaan dari ormas-ormas daerah yang menjadi “politik partisan”, tentunya dengan keterlibatan broker (penghubung) di dalamnya.

Jika kita membahas Baladika sebagai salah satu “partisan politik” untuk PDIP khususnya mempunyai hubungan rekam jejak yang hampir sama/serupa dengan masa Pilgub 2018 kemarin. Sebelumnya dalam Pilgub Bali 2013 Baladika juga memberikan dukungan ke elit PDIP. Namun tidak serta merta menyebutkan Baladika tetapi dengan sebutan *Pengabih* Puspayoga. Pada saat itu Baladika di brokeri oleh elit yang juga masih mempunyai hubungan dekat dengan Puri.

Secara simbolik yang mempunyai peranan yang sentral. Kalau secara organisasi dia memberikan interuksi karena Baladika itu satu komando. Kemudian dalam Pilgub Bali 2018 juga memainkan peran yang sama yaitu dukungan politik. Hanya saja disulaplah Baladika itu dengan istilah Semeton GB. Peranan *broker* atau penghubung sehingga terjadinya patronase dalam hal ini sangatlah sentral. Namun seorang broker sebut saja namanya baglug (bukan nama sebenarnya) dalam

memainkan peranannya sebagai broker tidak serta merta berjalan lancar.

Pada awalnya baglug bukan merupakan anggota Baladika. Yang mengajak masuk ke dalam jajaran kepengurusan organisasi adalah Pak Sudiantara menjadi anggota dewan Pembina. Berawal dari sinilah elit-elit yang ada di dalam internal Baladika dekat dengan *broker* ini, dan mereka masuk ke PDIP. Ini merupakan awal hubungan timbale balik antara Koster dengan *broker*.

Pada saat itu Koster masih menjadi anggota DPR RI dan sekaligus menjabat sebagai ketua DPD PDIP Bali. Berlanjut hingga memasuki tahun 2018. Pada saat pemilihan Gubernur Bali yang kala itu Wayan Koster bersama Cok. Oka A.A. Sukawati mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian timbal baliknya adalah *broker* ini yang membantu Koster dalam Pilgub.

Dalam alur patronase yang terjadi, penulis beranggapan bahwa jika kemudian Giri Prasta mampu mengkonsolidasikan Baladika yang dalam ini Alit Sucipta dan mengarahkannya ke Koster, hal itu karena dia (*Broker*) memang lebih punya pengaruh di Baladika secara organisasi.

5. KESIMPULAN

Selepas berakhirnya rezim orde baru kemudian beralih ke reformasi demokrasi yang sangat terbuka memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk ikut terlibat serta memperoleh keuntungan dengan terlibat dalam perumusan

kebijakan. Tidak terkecuali bagi aktor-aktor politik nonformal jalanan dengan latar belakang kekerasan.

Penelitian ini hadir dan mencoba untuk menggambarkan secara garis besar tentang bagaimana sepak terjang dari kelompok kekerasan lokal dalam manifestasinya sebagai politik partisan.

Hal ini karena orientasi mereka tidak lepas mengarah pada sumber-sumber ekonomi yang bisa diperoleh. Dengan keabsahan dan legitimasi yang diperoleh melalui proses elektoral demokrasi yang sah, sehingga mampu menjembatani antara politik informal kekerasan jalanan dengan politik formal parlemen di tingkat daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aspinal, Edward dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy For Sale : Pemilu, Klientalisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Masaaki, Okamoto dkk. 2006. *Kelompok Kekerasan Dan Bos Lokal Di Era Reformasi*. (Yogyakarta:IRE Prees)

Suryawan, I Ngurah. 2005. *Bali Narasi Dalam Kuasa : Politik Dan Kekerasan di Bali*. Yogyakarta : Ombak.

Wilson, Ian Doglas. 2018. *Politik Jatah Preman : Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Tangerang Selatan : Marjin Kiri.

Koran/Surat Kabar:

Bali Post, Senin Umanis, 5 Februari 2018.
KBS-ACE Meriahkan Art Center

“Satu Jalur, Satu Pulau, Satu Tata Kelola”.

Website:

Kumparan.com, 2018, *KPU resmi Umumkan Koster-Ace Unggul di Pilgub Bali*. Diakses dari: <https://kumparan.com/@kumparan/news/kpu-resmi-umumkan-koster-ace-unggul-di-pilgub-bali-27431110790541035> Diakses pada 8 September 2018 (12:23 WITA).